ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Nama Mahasiswa: Wanda Saputra

Email: wandasaputra199703@gmail.com

No BP : 1910003600010

Perguruan Tinggi: Universitas Ekasakti Padang

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 disebutkan bahwa : “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Menurut W. Friedman, negara hukum (rechstaat) mengandung arti pembatasan kekuasaan negara oleh hukum.¹

Salah satu ciri Negara hukum modern adalah adanya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia termasuk perlindungan hukum terhadap warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, selalu terjadi interaksi hubungan antara pejabat Negara dan masyarakat. Hubungan interaksi tersebut kebanyakan biasanya terjadi karena adanya tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hubungan antara pejabat administrasi negara sebagai pelaksana urusan pemerintahan dan pembangunan dengan masyarakat, sering terjadi benturan kepentingan yang melibatkan kedua pihak. Benturan kepentingan ini biasanya diakibatkan oleh adanya keputusan pejabat negara.

Pada dasarnya sengketa Tata Usaha Negara terjadi karena adanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan

hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.² Gugatan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum yang merasa dirugikan tersebut haruslah dengan alasan-alasan sesuai yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Sesuai prinsip Negara hukum, keputusan pejabat negara yang merugikan kepentingan masyarakat, dapat dilakukan gugatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara. Tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak selamanya sesuai dengan keinginan masyarakat, walaupun tindakan tersebut dilakukan untuk menjalankan urusan pemerintahan. Tindakan suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara seringkali bertentangan atau merugikan kepentingan masyarakat. Pertentangan antara

keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dengan kepentingan masyarakat secara individu seringkali terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³

Tindakan hukum Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dituangkan dalam bentuk Keputusan tertulis, dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan. Disatu sisi, keputusan tersebut diambil atas dasar kewenangan yang diberikan, namun disisi lain, pelaksanaan keputusan tidak boleh mengurangi hak-hak warganegara. Setiap keputusan Badan/pejabat Tata Usaha Negara harus berdasarkan prinsip Negara hukum, oleh karena itu, keputusan tersebut tidak boleh melanggar hak-hak warga negara.

Perlindungan terhadap hak-hak warga Negara merupakan salah satu pilar utama Negara hukum. Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga Negara adalah adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menguji keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat. Bagi setiap orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh adanya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan untuk melindungi hak-hak yang dimilikinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 144 dapat disebut Undang-Undang Peradilan Administrasi Negara, maka perlindungan hukum terhadap warga masyarakat atas perbuatan yang dilakukan oleh penguasa dapat dilakukan melalui 3 (tiga) badan, yakni sebagai berikut :⁴

- a. Badan Tata Usaha Negara, melalui upaya administratif;
- b. Peradilan Tata Usaha Negara; dan
- c. Peradilan Umum, melalui Pasal 1365 KUHPerdara.

Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah diatur Tentang Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)

dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN. PTUN mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa TUN di tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTTUN) untuk tingkat Banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

Salah satu bagian dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah izin. Hukum perizinan bagian dari hukum publik yaitu Hukum Administrasi Negara. Dimana izin berupa kewenangan dari Pejabat Administrasi Negara atau izin diterbitkan Pejabat Tata Usaha Negara. Tujuan perizinan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.⁵ Namun realitanya perizinan di tengah-tengah masyarakat, masih kerap jadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana contoh, kasus dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 98/G/201/PTUN.BDG terhadap Izin Mendirikan Bangunan Hotel Salak Tower Bogor di PTUN Bandung.

Majelis hakim PTUN Bandung pada Rabu tanggal 18 November 2015, menyatakan Surat Keputusan Wali Kota Bogor No. 644-530-BPPTPM-IV-2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT Hotel Properti Internasional menyalahi aturan. Surat keputusan yang diterbitkan pada tanggal 22 April 2013 itu harus dicabut dan dibatalkan oleh wali kota Bogor.

Menurut salah satu penggugat yang bernama Ahmad yang merupakan profesor dari Institut Pertanian Bogor (IPB), ada tiga hal yang menjadi tuntutan warga, yakni analisa mengenai dampak lingkungan (amdal), izin lingkungan, dan izin tetangga, serta tata ruang. Sejak awal pembangunan hotel tertinggi di Kota Bogor itu diduga tidak sesuai aturan.⁶

Dalam salinan putusan, Penerbitan IMB PT Hotel Properti Internasional hanya dilengkapi UKL/UPL (upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan). Seharusnya, wajib dilengkapi Amdal karena izin yang diberikan adalah untuk gedung dengan luasan

bangunan 17, 129 meter persegi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal. Dalam hal ini Majelis Hakim memandang pemerintah kota Bogor melanggar izin lingkungan dan asas kecermatan. Berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

“Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

Beberapa dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat sekitar akibat pembangunan hotel ini, diantaranya jarak antara rumah dan hotel hanya kurang dari satu meter. Lalu ada sekat setinggi empat meter di sekiling rumah warga yang menyebabkan berkurangnya pencahayaan sinar matahari dan udara segar ke dalam rumah warga.

B.PEMBAHASAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Ide Negara hukum lahir untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang dan mengabaikan hak-hak rakyat. 7

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 disebutkan bahwa : “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Dengan demikian setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan negara senantiasa didasarkan atas hukum,

bukan atas dasar kekuasaan belaka. Negara hukum, artinya diperintah oleh hukum (rule of law), bukan oleh sabda, pernyataan atau keputusan pimpinan/pejabat semata-mata (rule of decree). Negara hukum adalah negara yang sejatinya harus melindungi hak-haki rakyat demi terwujudnya kesejahteraan umum.

Sebagai penganut paham negara kesejahteraan (welfare state) tentunya Pemerintahan Negara Indonesia aktif untuk ikut campur dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tugas administrasi negara dalam welfare state ini menurut Lemaire adalah bestuurszorg yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum.⁸ Menurut Budi Ispriyarso,⁹ untuk mencapai tujuan negara kesejahteraan tersebut diperlukan berbagai sarana pendukung. Dalam hal ini salah satunya adalah sarana hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.

Sarana hukum administrasi negara diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari segala perbuatan administrasi negara, dan disamping itu pada dasarnya juga memberikan perlindungan hukum bagi administrasi negara dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. Hukum Administrasi Negara memberikan batasan-batasan keabsahan bagi perbuatan yang dilakukan oleh administrasi negara dan menjamin keadilan bagi masyarakat yang haknya dirugikan oleh perbuatan administrasi negara tersebut.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Untuk melaksanakan unsur tersebut diperlukan penegakan hukum supaya hukum menjadi kenyataan. Hukum tidak dapat dikatakan lagi sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan.¹⁰

Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum

yaitu:

1. kepastian hukum (rechtssicherheit),;
2. kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan
3. keadilan (gerechtigkei).¹¹

Menurut teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bertumpu pada dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila, khususnya dalam sila kelima yang berbunyi: “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan mengacu kepada dasar Negara itulah sudah seharusnya keadilan ditegakkan.

Dalam mengelola suatu Negara atau pemerintahan harus mempunyai batasan-batasan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan, disinilah muncul asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas adalah norma hukum yang kongkret yang mengatur perilaku kongkret tertentu, dapat diabstraksikan sebagai norma yang lebih umum, yang lingkupannya lebih luas sedangkan asas hukum mengandung nilai etis tertentu.

Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, diantara lain sebagai berikut :

1. Asas kepastian hukum;
2. Asas keseimbangan;
3. Asas kesamaan;
4. Asas bertindak cermat;
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan;

6. Asas larangan mencampur-adukan kewenangan;
7. Asas kejujuran dalam bertindak;
8. Asas larangan bertindak tidak wajar atau bertindak sewenang-wenang;
9. Asas pengharapan;
10. Asas meniadakan akibat keputusan yang yang batal; dan
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup.¹³

Asas inilah yang yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan pemerintahan yang baik bagi pejabat maupun dalam lingkup peradilan, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan dalam menjalankan tugasnya selalu berdasarkan hukum.

Peradilan administrasi merupakan salah satu Sarana hukum administrasi negara yang berdiri sendiri, bebas dan tidak memihak adalah salah satu unsur dari negara hukum, seperti yang telah dikemukakan oleh F. J. Stahl menyatakan bahwa negara-negara Eropa Continental dan negara-negara di bawah pengaruhnya memberikan empat unsur ciri negara hukum (rechstaat) yaitu :

1. perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
2. pemisahan/ pembagian kekuasaan;
3. setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada; dan
4. adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.¹⁴

Dibentuknya peradilan administrasi yang di Indonesia dikenal dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan indikasi dari negara hukum, yang mana Negara Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (rechstaat) bukan negara kekuasaan (machstaat). Dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat yang mencari keadilan. Pada dasarnya di dalam negara yang berlandaskan hukum keadilan mutlak ditegakkan.

Kedudukan PTUN mempunyai landasan yang kuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dirubah lebih lanjut beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.

Menurut Sjachran Basah, 15 tujuan PTUN adalah untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, baik bagi rakyat maupun administrasi negara dalam arti terjaganya keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu. Kepentingan administrasi negara berupa terjaganya ketertiban, ketentraman dan keamanan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, demi terwujudnya pemerintahan bersih dan berwibawa dalam kaitan negara hukum berdasarkan Pancasila.

Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan secara hukum yaitu adanya benturan kepentingan yang mungkin saja terjadi antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan orang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan orang atau badan hukum perdata (pihak Penggugat), walaupun dalam rangka pelaksanaan pemerintahan atau pembangunan, sebagaimana telah disebutkan oleh Nawawi sebagai berikut:

“Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan pembangunan bangsa, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara niscaya memerlukan kekuasaan. Adanya kekuasaan kerap kali diikuti oleh penyalahgunaan kekuasaan, karena selain mempunyai kemampuan mengatur “kuasa” itu atau Pejabat Tata Usaha Negara mengandung potensi menyeleweng. Semakin besar kekuasaan semakin besar pula penyelewengan dari badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu.”

C.PENUTUP

Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturanperundang-undangan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹⁷

Keputusan TUN yang dianggap mengabaikan hak-hak masyarakat sering menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara (sengketa TUN) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Untuk mengetahui mengenai pengertian sengketa tata usaha negara, maka perlu dilihat dari perumusan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Salah satu bagian dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah izin.

Hukum perizinan bagian dari hukum publik yaitu Hukum Administrasi Negara. Dimana izin berupa kewenangan dari Pejabat Administrasi Negara atau izin diterbitkan Pejabat Tata Usaha Negara. Tujuan perizinan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.¹⁸ Namun realitanya perizinan di tengah-tengah masyarakat, masih kerap jadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bentuk penyelesaian sengketa tata usaha negara yang melalui fungsi Peradilan TUN yaitu dihasilkannya Putusan akhir PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Adanya Putusan PTUN yang telah berkekuatan

hukum tetap dimaksudkan untuk menjadi jalan keluar hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pencari keadilan, sehingga pelaksanaan putusan menjadi hal yang krusial untuk dilakukan sebagai wujud perlindungan hukum bagi pencari keadilan. Hal tersebut dikarenakan sesuai ketentuan Pasal 115 UU No. 5 Tahun 1986, menyebutkan bahwa : “hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan”. Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim setelah pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara selesai yang mengakhiri sengketa tersebut pada tingkat pengadilan tertentu.¹⁹ Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui bahwa putusan akhir dapat berupa :

1. Gugatan Ditolak

Putusan yang berupa gugatan ditolak adalah putusan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dinyatakan batal atau sah. Dengan demikian, putusan yang berupa gugatan ditolak baru dijatuhkan oleh hakim setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara.

2. Gugatan dikabulkan

Putusan yang berupa gugatan dikabulkan adalah putusan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan batal atau tidak sah. Oleh Pasal 97 ayat (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa dalam hal gugatan dikabulkan maka dalam putusan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus ditentukan dalam Pasal 97 ayat (9) yang berupa:

- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, dan Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.

Sejak mulai efektif dioperasionalkannya Peradilan TUN hingga saat ini, eksistensi dan peran Peradilan TUN sebagai suatu lembaga peradilan yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara antara anggota masyarakat dan pihak pemerintah (eksekutif) melalui Putusan yang dihasilkannya, dirasakan oleh berbagai kalangan belum dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih yang memadai dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat serta dalam menciptakan prilaku aparatur yang bersih dan tata hukum, serta sadar akan tugas dan fungsinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat.²⁰ Hal tersebut disebabkan masih terdapat Putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN).

Dengan kata lain masalah yang paling mendasar dari eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara justru terletak pada ditaatinya atau tidak kewajiban-kewajiban yang dicantumkan dalam putusan Pengadilan tersebut oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Sebagaimana contoh, kasus dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 98/G/201/PTUN.BDG terhadap Izin Mendirikan Bangunan Hotel Salak Tower Bogor di PTUN Bandung. Majelis hakim PTUN Bandung pada Rabu tanggal 18 November 2015, menyatakan Surat Keputusan Wali Kota Bogor No. 644-530-BPPTPM-IV-2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT Hotel Properti Internasional menyalahi aturan. Surat keputusan yang diterbitkan pada tanggal 22 April 2013 itu harus dicabut dan dibatalkan oleh wali kota Bogor. Namun sampai saat ini pembangunan hotel tersebut masih tetap berlanjut. Artinya pemerintah kota Bogor dan pihak PT Hotel Properti Internasional tidak mematuhi putusan hakim PTUN Bandung tersebut,

dengan kata lain putusan hakim PTUN tersebut tidak dilaksanakan.

Peraturan yang mengatur Pelaksanaan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dalam sengketa TUN diatur dalam Pasal 116 Undang – Undang No. 51 tahun 2009 yang dijelaskan sebagai berikut :

(1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat) belas hari kerja.

(2) Apabila setelah 60 enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90(sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif.

(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Di samping diumumkan pada media cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan Pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018.

Laurensius Arliman S, Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Laurensius Arliman S, Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia, Jurnal Selat, Volume 4, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman, Justicia Islamica, Volume 13, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Oleh Pemerintah Kota Padang, Veritas et Justitia, Volume 2, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Lex Jurnalica*, Volume 13, Nomor 3, 2016.

Laurensius Arliman S, Komnas Perempuan Sebagai State Auxiliary Bodies Dalam Penegakan HAM Perempuan Indonesia, *Justicia Islamica*, Volume 14, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Jurnal Hukum Doctrinal*, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights In The Area Of Social Conflict, *The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International Conference (Usicon)*, Volume 1, 2017.

Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia, *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.

Laurensius Arliman S, Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak, *Jurnal Respublica* Volume 17, Nomor 2, 2018.

Laurensius Arliman S, Menjerat Pelaku Penyusur Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial, *Jurnal Gagasan Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Laurensius Arliman S, Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi, *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, Volume 6, Nomor 2, 2020.

Laurensius Arliman S, Pendidikan Kewarganegaraan, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Laurensius Arliman S, Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020, <http://dx.doi.org/10.46839/Iljih.v6i2.151>.

Laurensius Arliman S, Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.

Laurensius Arliman S, Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.

Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak, Volume 17, No Nomor, 2020.

Larensius Arliman S, Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).3779).

Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash), Volume 1, Nomor 2, 2020.

Otong Rosadi dan Laurensius Arliman S, Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Idelogi Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa

Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1, Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.